

**KOLABORASI ANTAR INSTITUSI DALAM  
PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA NANGELASARI  
KECAMATAN CIPATUJAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
(Studi Tentang Wisata Leuwi Eretan)**

**Dede Reza Padilah**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*

E-mail : rezapadilah07@gmail.com

**ABSTRAK**

*Penelitian ini di latar belakang Kolaborasi Antar Institusi Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Nangelasari Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya belum optimal. Hal itu terlihat dari beberapa indikator masalah yaitu tidak adanya kordinasi phak pemerintah desa dengan pihak sawast dalam menjalin kemitraan serta tidak ada keterlbatan akademisi dalam pengembangan objek wisata Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi dan wawancara Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kolaborasi Antar Institusi Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Nangelasari Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya secara umum kurang dilaksanakan secara optimal karena terdapat hambatan-hambatan belum adanya keterlibatan akademisi dalam pengembangan objekwisata, belum adanya kolaborasi dengan pihak swasta, belum ada perjanjian tertulis dengan pihak berbagai elemen terkait, belum optimalnya sosialisasi hasil musyawarah kepada masyarakat, dan belum optimalnya hasil keuntungan bagi aktor pengembang objek wisata Untuk mengatasi hambatan-hambatan dilakukan upaya diantaranya mengoptimalkan unsur-unsur kolaborasi atau kemitraan.*

**Kata Kunci :** *Kolaborasi, Pengembangan Pariwisata, Desa nangelasaari*

**PENDAHULUAN**

Pariwisata merupakan industri yang potensial untuk dikembangkan dan berperan penting dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah serta dapat meningkatkan pendapatan daerah, karena pariwisata merupakan suatu hal yang dapat mengundang wisatawan

untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Isdarmanto (2016:6) yang mengemukakan “pariwisata merupakan kegiatan yang bersifat dinamis serta melibatkan banyak orang baik secara perorangan maupun kelompok serta menghidupkan berbagai bidang di sektor usaha.

Adapun untuk pengembangannya, sektor pariwisata tidak bisa secara mandiri, tetapi sangat membutuhkan dukungan dari pihak-pihak seperti pemerintah, investor dan masyarakat untuk dapat maju dan berkembang atau menjadi lebih baik dari sebelumnya, sebelum pengembangan atau pembangunan, Demikian juga dengan pendapat Sedarmayanti, (2018:126-127) mengenai tercapainya pengembangan dan pengelolaan pariwisata yaitu : Untuk tercapainya pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata yang berdaya guna dan berhasil guna dan berhasil mendukung pembangunan kepariwisataan perlu pengelolaan destinasi pariwisata yang didukung oleh seluruh stakeholder kepariwisataan ,baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pengembangan dan pengelolaan sebuah destinasi pariwisata. Pendapat tersebut juga sesuai dengan isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata BAB 1 Pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan pariwisata adalah bermacam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Daerah. kemudian masih dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pada BAB IV pasal 8 ayat (1) yang menjelaskan pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan

nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Hal ini juga yang menjadi dasar hukum dalam pengembangan pariwisata.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa betapa pentingnya sektor pembangunan pariwisata untuk pengembangan ini perlu dilakukan kerjasama atau kemitraan melalui pendekatan dengan organisasi pariwisata yang ada terdiri dari pemerintah, swasta, masyarakat dan pihak terkait yang diharapkan dapat mendukung pembangunan pariwisata di daerah itu sesuai dengan pernyataan Notoatmojo (2003) menyatakan bahwa kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdapat dua pihak atau lebih, merupakan pemerintah swasta dan masyarakat.
- b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan Tirta wisata
- c. Ada kesepakatan antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan Tirta wisata yang dapat memberikan efek positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar saling membutuhkan antara pihak pemerintah, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam pengelolaan.

Berbicara mengenai pengembangan pariwisata atau potensi objek wisata, kewenangannya berada pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintah tertinggi di tingkat desa yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjadi dasar hukum dalam mengembangkan dan menggali potensi pariwisata, maka Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk menggali atau mengembangkan potensi sumber daya alam yang meningkat kesejahteraan masyarakat desa dan mengembangkan perekonomian desa. Sesuai dengan isi dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada BAB V Pasal 26 ayat (4), dimana dalam ayat tersebut terdapat poin-poin salah satunya yaitu, mengembangkan perekonomian masyarakat desa dan juga, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 tahun 2017 tentang desa BAB IX Pasal 158 ayat (1) bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Nangelasari, tampak jika Kolaborasi Antar Institusi

Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Nangelasari Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya masih belum optimal, tentang itu tampak dari adanya indikator- indikator sebagai berikut:

1. Pemerintah desa belum membuka komunikasi dengan akademisi mengenai meminta saran terkait pengembangan objek wisata karena objek wisata ini terbilang baru dibuka jadi masih sulit untuk melibatkan para akademisi.
2. Belum adanya keterlibatan dengan pihak swasta karena pihak swasta menilai bahwa objek wisata leuwi Eretan ini masih terbilang baru maka dari itu pihak swasta masih dalam tahapan mempertimbangkan untuk bisa ikut bekolaborasi dalam pengembangan objek wisata.
3. Belum adanya kerjasama dengan berbagai elemen terkit, seperti dengan dinas pariwisata dan pihak swasta.
4. Belum ada keuntungan yang di rasakan oleh pemerintah desa dan masyarakat karena dari penjualan tiket masuk dan pengelolaan prkir di kembalikan untuk biaya pengembangan.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan yaitu: Bagaimana Kolaborasi Antar Institusi Dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Nangelasari Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya..?

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Kolaborasi

Secara filosofis, kolaborasi merupakan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Schrage (dalam Harley dan Bisman, 2010:18) bahwa, "kolaborasi merupakan upaya penyatuan pada berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. kolaborasi membutuhkan berbagai macam faktor baik individu maupun organisasi yang bahu-membahu mengerjakan tugas demi tercapainya tujuan bersama.

Ansell dan Gash (2017: 546) Mendefinisikan Collaborative Governance sebagai berikut ini:

*Collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholder no- stake Di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal berorientasi konsensus dan delibeartive Yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset.

Menurut Agrawal dan Lemos (dalam Subarsono,2011) mengemukakan bahwa:

Collaborative governance tidak hanya terbatas pada pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya "multipartner governance" yang meliputi sektor privat/ swasta, masyarakat dan komunitas sipil

dan terbangun atas sinergi peran pemangku kepentingan dan penyusunan rencana yang bersifat "hybrid" seperti halnya kerja sama publik-privat-sosial.

### 2. Collaborative Governance

Menurut Edward Deseve (dalam Sudarmo, 2015) mendefinisikan: *Collaborative governance* adalah sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang dikelola melintasi batas-batas organisasi formal dan informal dengan prinsip-prinsip organisasi yang direkonsepsi dan definisi kesuksesan yang jelas".

Hal ini sejalan dengan teori Agrawal dan lemos (dalam Subarsono,2011) menyatakan bahwa:

collaborative governance tidak hanya terbatas pada pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya "multipartner governance" yang meliputi sektor privat/ swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran pemangku kepentingan dan penyusunan rencana yang bersifat "hybrid" seperti halnya kerja sama publik-privat-sosial.

### 3. Model Kolaborasi

Model collaborative governance menurut H. Brinton Milward dan Keith G. Provan dibagi menjadi model *self-governance*, *lead governance* dan *network administrative governance* (Milward dan Provan, 2006; Sudarmo, 2011).

1. Model *self-governance* ditandai dengan struktur dimana tidak ada entitas administratif namun demikian masing-masing pemangku kepentingan berpartisipasi dalam jaringan (*network*), dan manajemen dilakukan semua anggota (pemangku kepentingan) atau yang terlibat.
2. Model *lead organization* ditandai dengan adanya entitas administrative (dan juga manajer yang melakukan jaringan) sebagai anggota *network* atau penyedia layanan.
3. Model *network administrative organization* ditandai dengan adanya entitas administratif secara tegas, yang dibentuk untuk mengelola "*network*" bukan sebagai "service provider" dan manajernya digaji.

Model ini merupakan campuran dari dua model sebelumnya yaitu model *self-governance* dan *lead organization*. Menurut Retno, et al. (2020)

Seigler (Astuti *et al*, 2020:87) menyampaikan 8 (delapan) prinsip utama dalam penerapan *collaborative governance* yakni:

1. Warga masyarakat harus turut dilibatkan dalam produksi barang publik;
2. Masyarakat harus mampu memobilisasi sumber daya dan aset untuk memecahkan masalah publik;

3. Tenaga profesional harus berbagi keahlian mereka dengan untuk memberdayakan warga masyarakat;
4. Kebijakan harus menghadirkan musyawarah publik;
5. Kebijakan harus mengandung kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan;
6. Kebijakan harus strategis;
7. Kebijakan harus mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemecahan masalah publik;
8. Kebijakan harus mengandung akuntabilitas.

#### 4. Promosi Pariwisata

Promosi ialah proses yang digunakan untuk mengantarkan data informasi terhadap sasaran pasar, mengenai perihal – perihal yang berkaitan dengan produk, harga, tempat produk yang dijual dengan melaksanakan ajakan ataupun persuasi yang bertujuan agar sasaran bersedia melaksanakan pembelian (Yoeti, 2008).

Menurut pendapat Sunaryo (dalam Herat dkk., 2015). Memaparkan:

Aktivitas promosi kepariwisataan secara prinsip merupakan kegiatan komunikasi, yang dilakukan oleh organisasi penyelenggara pariwisata (destinasi) yang berusaha mempengaruhi khalayak atau pasar wisatawan yang merupakan tumpuan atau sasaran dari penjualan produk wisatanya.

## 5. Pentingnya kolaborasi

Pembangunan di sektor pariwisata saat ini sedang dalam pengembangan, dengan pengembangan pariwisata menjadi konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan adalah pembangunan kepariwisataan yang memperhatikan minat wisatawan dan partisipasi langsung masyarakat lokal dengan menjaga stabilitas ekologis dalam pengelolaan pariwisata jangka panjang untuk memenuhi aspek ekonomi, sosial dan estetika, serta berguna untuk menjaga keutuhan ekologi, keanekaragaman hayati, budaya dan sistem kehidupan. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata juga digunakan untuk mengelola sumber daya alam daerah. Oleh karena itu, peran serta lintas sektor baik pemerintah maupun sektor publik dan swasta dalam pengelolaan pariwisata sangat diperlukan.

Menurut pendapat Notoatmodjo (2003) menyatakan bahwa kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terdapat dua pihak atau lebih merupakan pemerintah swasta dan masyarakat.
2. Memiliki kesamaan visi misi dalam mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan Tirta wisata.
3. Ada kesepakatan antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan Tirta wisata yang dapat memberikan efek positif terhadap perekonomian

masyarakat sekitar saling membutuhkan antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam pengelolaan.

## METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data serta verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun untuk mengetahui Kolaborasi Antar Institusi Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Nangelasari Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dapat di tinjau dari teori Seigler (2011) menyampaikan 8 (delapan) prinsip utama dalam penerapan collaborative governance yakni: Warga masyarakat harus turut dilibatkan dalam produksi barang publik, Masyarakat harus mampu memobilisasi sumber daya dan aset untuk memecahkan masalah publik, Tenaga profesional harus berbagi keahlian mereka dengan untuk memberdayakan warga masyarakat, Kebijakan harus menghadirkan musyawarah publik, Kebijakan harus

mengandung kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan, Kebijakan harus strategis, Kebijakan harus mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemecahan masalah publik. Kebijakan harus mengandung akuntabilitas.

### **1. Warga masyarakat harus turut dilibatkan dalam produksi barang publik**

Keterlibatan masyarakat saat ini menjadi bagian yang perlu dioptimalkan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, para pihak dapat bersama sama untuk meningkatkan kualitas produksi barang publik. Fungsi kontrol dari masyarakat juga dapat membantu bagaimana produksi barang publik dapat terselenggara dengan sebagaimana mestinya. Untuk mewujudkan keterlibatan masyarakat tersebut, dibutuhkan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai peran masyarakat di dalam produksi barang publik, seperti hak dan kewajiban masyarakat. Masyarakat berkewajiban untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam standar produksi barang publik.

Berdasarkan hasil penelitian dimensi Warga masyarakat harus turut dilibatkan dalam produksi barang publik sudah optimal karena masyarakat ikut terlibat dalam pengembangan objek wisata Leuwi Eretan hal ini terlihat dari keterlibatannya masyarakat seperti pengelolaan tiket masuk dan pengelolaan parkir motor selain itu

masyarakat di sediakan lapak untuk bisa berjualan di tempat objek wisata Leuwi Eretan. Hal ini sejalan dengan teori pendapat ahli Menurut Agrawal dan Lemos (dalam Subarsono,2011) mengemukakan bahwa:

Collaborative governance tidak hanya terbatas pada pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya “multipartner governance” yang meliputi sektor privat/ swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran pemangku kepentingan dan penyusunan rencana yang bersifat “hybrid” seperti halnya kerja sama publik-privat-sosial.

Dengan demikian, teori ahli menunjukkan bahwa dalam kolaborasi pengembangan objek wisata masyarakat harus turut dilibatkan dalam produksi barang publik.

### **2. Masyarakat harus mampu memobilisasi sumber daya dan aset untuk memecahkan masalah publik.**

Desa wisata merupakan salah satu objek wisata yang sedang berkembang pada sektor pariwisata. Desa wisata biasanya dikembangkan pada kawasan pedesaan yang didalamnya masih memiliki karakteristik khusus. Karakteristik yang dimiliki pada desa wisata adalah sumber daya alam yang masih asli, keunikan desa, tradisi dan budaya masyarakat lokal. Berbagai karakteristik tersebut menjadi identitas

suatu desa wisata yang memiliki kegiatan wisata yang banyak diminati oleh wisatawan. Selain itu, desa wisata secara tidak langsung dapat mendorong masyarakat lokal untuk menjaga dan melestarikan alam serta kebudayaan yang telah dimiliki desa tersebut.

Masyarakat lokal pada pengembangan desa wisata memiliki peranan yang cukup besar, dimana masyarakat yang mengoperasikan dan mengontrol berjalannya pengembangan desa wisata baik dari penentuan produk hingga manfaat yang diterimanya. Manfaat yang diterima oleh masyarakat lokal adalah mendorong mensejahterakan perekonomian masyarakat dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan alam sehingga mampu menyerap tenaga masyarakat lokal, menciptakan wirausaha, dan menciptakan kegiatan positif di bidang pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dalam dimensi Masyarakat harus mampu memobilisasi sumber daya dan aset untuk memecahkan masalah publik objek wisata, selama ini memang terlihat bahwa masyarakat berantusias dengan adanya objek wisata ini. Masyarakat membantu pemerintah desa dalam mempromosikan objek wisata di media sosial masing-masing dan ada juga yang mempromosikannya dengan cara interaksi secara langsung.

Sesuai dengan teori ahli Sunaryo (dalam Herat dkk., 2013).  
Memaparkan:

Aktivitas promosi kepariwisataan secara prinsip merupakan kegiatan komunikasi, yang dilakukan oleh organisasi penyelenggara pariwisata (destinasi) yang berusaha mempengaruhi khalayak atau pasar wisatawan yang merupakan tumpuan atau sasaran dari penjualan produk wisatanya.

Dengan demikian sejalan dengan teori di atas menunjukkan bahwa Masyarakat mampu memobilisasi sumber daya dan aset untuk memecahkan masalah publik. Hal ini karena bawasanya sekecil apa pun peran yang dilakukan oleh masyarakat sepanjang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak agar berminat untuk berkunjung ke destinasi wisata Leuwi Eretan merupakan bentuk promosi pariwisata yang perlu diperhitungkan. Jadi masyarakat sudah terlibat dalam memobilisasi dan memecahkan masalah dengan cara ikut mempromosikan objek wisata Leuwi Eretan.

### **3. Tenaga profesional harus berbagai keahlian mereka, untuk memperdayakan warga masyarakat**

Sektor pariwisata saat ini menjadi bidang yang potensial untuk memberikan sumbangsih pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada banyak negara di dunia, proses perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata tidak sering menjadi skala prioritas kerja pemerintahan. Di banyak negara, dalam proses perencanaan dan pengembangan



kepariwisataan, pembahasan tentang SDM yang dibutuhkan dalam pelayanan kegiatan kepariwisataan yang benar dan efektif seringkali mendapat perhatian yang rendah. Dalam beberapa kasus, bahkan sama sekali diabaikan. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya permasalahan serius dalam industri kepariwisataan, dan memungkinkan terhalangnya partisipasi masyarakat setempat dalam kegiatan ekonomi yang dikembangkan dari pengembangan kepariwisataan.

Pengembangan kawasan wisata di Indonesia muncul sebagai industri baru yang diharapkan dapat mendongkrak pendapatan nasional maupun daerah, sehingga pemerintah berupaya keras untuk mengembangkan sektor ini dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu pengelolaan, pengembangan, dan pembiayaan kawasan wisata memerlukan daya dukung dari banyak stakeholders holder (public, private, dan society) sehingga prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Namun demikian keberhasilan pengembangan kawasan ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi stabilitas keamanan dan politik, daya dukung sumberdaya manusia yang memiliki keahlian yang sesuai baik segi kualitas maupun kuantitasnya, adanya anggaran yang digunakan untuk mengembangkan sarana dan prasarana kawasan wisata, kebijakan hukum yang memberikan kemudahan, keamanan, transparansi dan kenyamanan bagi para investor

maupun wisatawan dalam menanamkan modal dan menikmati kawasan wisata, serta sosialisasi dan promosi atas pengembangan dan pemanfaatan kawasan wisata.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui terkait dengan dimensi Tenaga profesional harus berbagai keahlian mereka, untuk memperdayakan warga masyarakat belum optimal. Hal ini karena dalam pengembangan objek wisata leuwi Eeretan belum ada keterlibatan dari pihak akademisi maupun pihak swasta dari hasil observasi dan wawancara bahwa pemerintah desa kurang memberikan ruang ke pada pihak akademisi dan kurangnya pendekatan dengan pihak swasta.

Berdasarkan hasil penelitian tidak sejalan dengan pendapat ahli Balogh, et al. (dalam Subarsono, 2011) mendefinisikan collaborative governance sebagai berikut:

Collaborative governance sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan Perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak.

Dengan demikian, teori ahli menunjukkan dalam kolaborasi pengembangan objek wisata perlu

adanya keterlibatan aktor-aktor yang secara konstruktif yang berasal dari berbagai level, tidak terkucuali swasta dan akademisi.

#### **4. Kebijakan Harus Menghadirkan Musyawarah Publik.**

Pembangunan yang sukses bergantung pada perencanaan yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan desa dianggap baik jika prosesnya melibatkan kelompok-kelompok penting dan partisipasi masyarakat desa. Dengan berpartisipasi, masyarakat akan mengetahui skala prioritas kebutuhan yang diidentifikasi dalam program dan akan berperan aktif dalam pelaksanaan dan pemantauan hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa partisipatif dapat dilakukan secara bertahap melalui sosialisasi dengan mengajak masyarakat untuk bekerjasama, identifikasi data masalah dan potensi desa, analisa data potensi dan masalah, menyusun program dan kegiatan, dan menentukan skala prioritas program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui terkait dimensi kebijakan harus menghadirkan musyawarah publik sudah optimal, hal ini karena dalam musyawarah pengembangan objek wisata Leuwi Eretan melibatkan masyarakat, Hal ini sejalan dengan teori pendapat ahli Menurut Ansell dan Gash (2018) mendefinisikan:

Istilah collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik.

Dengan demikian, teori ahli menunjukkan bahwa dalam kolaborasi pengembangan objek wisata masyarakat harus turut dilibatkan dalam merumuskan kebijakan.

#### **5. Kebijakan Harus Mengandung Kemitraan Kolaboratif Yang Berkelanjutan**

Kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademis, dan masyarakat merupakan kunci utama untuk meningkatkan kesadaran akan potensi pariwisata yang berkelanjutan dan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat luas. Untuk melakukan hal tersebut, perlu adanya kebijakan yang mengandung kolaboratif yang berkelanjutan yang dibuat dengan cara bergandengan tangan dan memberikan dorongan serta inovasi akan potensi objek wisata yang ada di desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui dalam dimensi kebijakan harus mengandung kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan belum optimal, hal ini karena belum adanya keterlibatan swasta dalam merumuskan kebijakan

dan pemerintah desa kesulitan untuk berkerjasama dengan berbagai elemen terkait karena objek wisata Leuwi Eretan masih baru di buka.

Hal ini tidak sejalan dengan yang dikemukakan oleh Tjiptoherijanto (2010) mendefinisikan :

Good Governance dari sudut pandang harapan aktor-aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyatakan bahwa Good Governance adalah tata kelola yang berupaya memenuhi harapan-harapan pihak yang terlibat (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya keterlibatan para stakeholder, maka pengambilan keputusan, dalam pelayanan publik akan mendapatkan pertimbangan yang matang dan semua keinginan para stakeholder akan tercapai.

Dengan demikian, teori ahli menunjukkan dalam dimensi kebijakan harus mengandung kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan bahwa dalam kolaborasi pengembangan objek wisata, harus berkerjasama melibatkan satu lembaga pemerintah dan satu lembaga swasta.

## **6. Kebijakan Harus Strategis**

Sebagai pilihan tindakan yang terbaik bukan merupakan akhir dari formulasi atau perumusan strategi. Namun Pemilihan terhadap alternatif tindakan yang strategis organisasi harus mengembangkan kebijakan lebih lanjut. Kebijakan pada umumnya dijadikan sebagai panduan umum

mengenai implementasi strategi. Kebijakan juga dapat membatasi pilihan strategi di masa yang akan datang sehingga perubahan strategi harus diikuti dengan perubahan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui dalam dimenis kebijakan harus stategi belum optimal, hal ini karena dalam pengembangan objek wisata Leuwi Eretan belum ada keuntungan yang di rasakan opel pemerintah desa dan masyarakat adapun keuntungan yang di peroleh dari pengelolaan karcis masuk dan pengelolaan parkir di putarkan kembali untuk biaya pengembangan objek wisata.

Hal ini tidak sejalan yang dikemukakan oleh Sink (1998) (dalam Dwiyanto, 2011:253) bahwa:

Kerjasama kolaboratif sebagai tanda Sebuah proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap suatu masalah tentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri.

Berdasarkah teori di atas seharusnya kerjasama sebagai tanda sebuah proses di mana organisasi-organisasi yang memiliki kepentingan organisasi mendapatkan keuntungan dalam pengembangan objek wisata Leuwi Eretan

## **7. Kebijakan mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemecahan masalah publik.**

Pada umumnya kebijakan atau policy diperlukan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu.

Berdasarkan penelitian dapat di ketahui dalam dimensi Kebijakan mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemecahan masalah publik. Dalam pengembangan objek wisata Leuwi Eretan sudah optimal, dengan adanya dalam pengembangan objek wisata ini ada dapat membantu mengurangi angka pengangguran di desa Nangelasri selain itu objek wisata ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Sink (1998) (dalam Dwiyanto, 2011:253) bahwa:

Kerjasama kolaboratif sebagai tanda Sebuah proses dimana organisasi-organisasi yang

memiliki suatu kepentingan terhadap suatu masalah tentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri.

Berdasarkan teori di atas kerjasama sebagai tanda sebuah proses di mana organisasi-organisasi yang memiliki kepentingan organisasi dapat mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemecahan masalah publik, hal ini karena dengan adanya objek wisata ini dapat menurunkan angka pengangguran serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

## **8. Kebijakan harus mengandung akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam berkolaborasi merupakan permasalahan yang kompleks karena tidak jelas kolaborasi tersebut bertanggung jawab kepada siapa dan untuk apa. Anggota yang berkolaborasi atau para pemangku kepentingan bisa memiliki persepsi yang berbeda dalam menilai hasil yang dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui dalam dimensi kebijakan harus mengandung akuntabilitas sudah optimal, hal ini karena adanya laporan keuangan ke pada masyarakat, meskipun keuntungan yang di dapatkan dari pengembangan objek wisata Leuwi Eretan di putarkan kembali untuk biaya pengembangan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli (Donahue, 2004). Mendefinisikan bahwa:

Akuntabilitas dapat berkaitan dengan input, proses, atau hasil. Tiga kriteria umum yang digunakan untuk menilai keberhasilan kolaborasi lintas sektor yaitu kondisi awal, memenuhi keinginan para anggota dan Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik melahirkan hasil/kebijakan alternatif yang lebih baik yang dapat menciptakan nilai publik.

Berdasarkan pemaparan teori di atas dapat diketahui bahwa laporan keuangan objek wisata Leuwi Eeretan telah dilaksanakan secara akuntabel. ini merupakan wujud pertanggung jawaban hal ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dari kolaborasi lintas sektor yaitu kondisi awal, di dalam Collaborative Governance dalam perspektif administrasi publik melahirkan hasil/ kebijakan alternatif yang lebih baik yang dapat menciptakan nilai publik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kolaborasi antar institusi dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Nangelasari Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, disimpulkan dari hasil penelitian ini dapat peneliti uraikan bahwa kolaborasi antar institusi dalam pengembangan Desa Wisata di Desa

Nangelasari Kecamatan Ciptujah Kabupaten Tasikmalaya belum berjalan dengan optimal, dilihat dari dimensi yang dijadikan alat ukur masih terdapat dimensi yang belum sesuai dalam pelaksanaannya seperti: Tidak ada pihak swasta dalam pengembangan objek wisata, belum adanya kolaborasi dengan pihak swasta, belum adanya perjanjian tertulis dengan elemen terkait, belum optimalnya keuntungan bagi aktor pengembang. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dilakukan berbagai upaya diantaranya

Berkomunikasi secara intens dengan akademisi melalui pasilitator, terus berkordinasi dengan pihak swasta seperti Bank CIJ dan Pengusaha Daerah agar bisa berkerjasama dalam pengembangan objek wisata ini, Meyakinkan pihak swasta agar pihak swasta bisa ikut berkolaborasi dalam pengembangan objek wisata, menganggarkan anggaran dana desa untuk pengembangan.

## **DAFTAR FUSTAKA**

### **Buku-Buku :**

Ansell, C., & Gash, A. (2008).

*Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory.*

Agus Dwiyanto. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik.* Yogyakarta. Gadjah Mada

- Donahue, J. D. (2004). *On Collaborative Governance*
- Dwiyanto. A (2011). *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Hadiwijoyo, Surya Sakti. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Isdarmanto. 2016. *Dasar-dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gerbang Media Akasara dan StiPrAm Yogyakarta
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2003, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. University Press.
- O'Flynn, Janine and John Wanna. 2008. *Collaborative Governance: A New Era Of Public Policy In Australia?*. Australia: ANU E Press
- Sedarmayanti. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung : PT Refika Aditama
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Sudarmo. (2011). *Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. Smart Media.
- Sunaryo, Bambang. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Yoeti, Oka A, 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Jurnal :**
- Sudarmo. (2015). *Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance: Memuat Pengalaman Penelitian Lapangan tentang Isu Pedagang Kaki Lima Dan Konflik Antar Kelompok*. Sebelas Maret University Press.
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Mandala Manurung. (2010) *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta, UI Press.
- Dokumen :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.*